



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	: 7 (tujuh)
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan	: 1. Menteri Perdagangan RI 2. Menteri Perindustrian RI 3. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 4. Kepala Badan Standardisasi Nasional 5. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) 6. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Hari, Tanggal	: Rabu, 4 Februari 2026
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Prof. Dr. Drs. H.A.M Nurdin Halid (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) dilanjutkan oleh Eko Hendro Purnomo, S.Sos. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Pembahasan mengenai penyelamatan industri baja nasional (tindaklanjut RDP Komisi VI DPR RI dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 30 September 2025). 2. Pembahasan evaluasi kebijakan tata niaga pakaian bekas (tindaklanjut RDPU Komisi VI DPR RI dengan Masyarakat pada tanggal 2 Desember 2025) 3. Tindaklanjut aduan masyarakat terkait perlindungan konsumen (tindaklanjut RDPU Komisi VI DPR RI dengan Masyarakat pada tanggal 2 Desember 2025)
Hadir	: 1. 33 orang dari 46 orang Anggota Komisi VI DPR RI. 2. a. Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso; b. Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri; c. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza; d. Plt. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Syaiful Ahmar; e. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Y. Kristianto Widiwardono; f. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria; dan g. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Akbar Djohan; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 10.18 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 4 Februari 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, dan dilanjutkan oleh Bapak Eko Hendro Purnomo, S.Sos., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Wakil Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Ketua Badan Perlindungan Konsumen, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, dan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terkait upaya penyelamatan industri baja nasional dan evaluasi kebijakan tata niaga pakaian bekas, serta tindak lanjut aduan masyarakat terkait perlindungan konsumen.
2. Terkait dengan Industri Baja Nasional Komisi VI DPR RI mendorong:
 - a. BPI Danantara untuk menjadikan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai *One Stop Services* untuk pemenuhan kebutuhan baja seluruh Proyek Strategis Nasional
 - b. Pemerintah untuk melakukan percepatan proses pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk tindakan pengamanan
 - c. Kementerian Perdagangan untuk melakukan perbaikan / transformasi tata niaga impor besi dan baja
 - d. Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - e. Badan Standardisasi Nasional mendorong perluasan cakupan SNI Wajib.
3. Terkait dengan Perlindungan Konsumen, Komisi VI DPR RI mendukung dan mendorong:
 - a. Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN untuk meningkatkan fungsi perlindungan konsumen melalui layanan fasilitasi pengaduan konsumen sesuai dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2025
 - b. BPKN terus melakukan upaya perlindungan konsumen melalui penguatan tugas dan wewenangnya.
4. Terkait dengan temuan Impor Pakaian Bekas, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemusnahan barang terhadap temuan pakaian bekas.

5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk tidak menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) terhadap produk baja sepanjang yang sudah bisa diproduksi dalam negeri oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan industri baja nasional dengan mempertimbangkan *supply* dan *demand*.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi HS Code 9406 dan menerapkan larangan terbatas terhadap baja Prefabrikasi sebagai upaya untuk menjaga ekosistem produksi baja dalam negeri.
7. Dalam rangka penyehatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, maka Komisi VI DPR RI merasa perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Industri Baja Nasional.
8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Perlindungan Konsumen, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pelaksana BPI Danantara dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk memberikan jawaban tertulis sejelas-jelasnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.35 WIB.

**MENTERI
PERDAGANGAN RI,**

Ttd.

BUDI SANTOSO

**WAKIL MENTERI
PERINDUSTRIAN RI,**

Ttd.

FAISOL RIZA

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
A-499

**PLT. KETUA
BADAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN NASIONAL,**

Ttd.

SYAIFUL AHMAR

**KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

Ttd.

Y. KRISTIAN TO WIDIWARDONO

**CHIEF OPERATING OFFICER
BPI DANANTARA,**

Ttd.

DONY OSKARIA

**DIREKTUR UTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)
TBK,**

Ttd.

AKBAR DJOHAN